

PENGABDIAN MASYARAKAT SOSIALISASI KEKUATAN PANCASILA DI ERA GLOBALISASI DUNIA SEBAGAI ARUS PERUBAHAN SOSIAL DI KOTA BLITAR TAHUN 2024

Didik Suhariyanto¹

Program Studi Hukum, Program Magister, Universitas Bung Karno

e-mail: didiksuhariyanto4@gmail.com

Abstrak

Tujuan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Kekuatan Pancasila Di Era Globalisasi Dunia Sebagai Arus Perubahan Sosial Di Kota Blitar di Aula Pemerintah Kota Blitar tanggal 19 – 21 Juni 2024 dalam rangka Memperingati bulan-bulan Bung Karno (Hari lahir dan Haul Bung Karno), diikuti mahasiswa dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno (BPP ABK) Universitas Bung Karno Jakarta. Dengan kekuatan Pancasila di tengah-tengah arus globalisasi sebagai arus perubahan sosial tetap mengutamakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa dan negara yang adil dan makmur sejahtera. Sehingga kami dari Universitas Bung Karno Jakarta sangat penting melaksanakan Pengabdian Masyarakat, sebagai salah satu pembinaan bagi mahasiswa, masyarakat dan elemen bangsa.

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat, Pancasila, Era Globalisasi

Abstract

Community Service Objective Socialization of the Power of Pancasila in the Era of World Globalization as a Current of Social Change in the City of Blitar in the Blitar City Government Hall on 19 - 21 June 2024 in commemoration of the months of Bung Karno (Bung Karno's birthday and Haul), attended by students and the Development Board and Development of Bung Karno's Teachings (BPP ABK) Bung Karno University Jakarta. With the strength of Pancasila in the midst of globalization as a current of social change, we continue to prioritize the principle of Bhinneka Tunggal Ika to achieve the goal of a just and prosperous nation and state society. So it is very important for us at Bung Karno University Jakarta to carry out Community Service, as a form of guidance for students, society and elements of the nation.

Keywords: Community Service, Pancasila, Era of Globalization

PENDAHULUAN

Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik sosial, politik, hukum maupun ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas pada satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.

Pada dasarnya Globalisasi merupakan proses perubahan yang cepat dan ber-kompetisi yang tinggi, serta menempatkan Indonesia pada posisi yang tampak lemah, sehingga Indonesia harus dapat membangun kekuatan yang bisa diciptakan melalui:

- a. Membangun nasionalisme konsumen agar mencintai produk dalam negeri,
- b. Mendorong dan memfasilitasi agar SDM yang dimiliki dapat menguasai teknologi dan mampu bersaing,
- c. Memperkuat asosiasi-asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi,
- d. Memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal ke kancah yang lebih luas,
- e. Melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi tanpa melanggar kesepakatan global yang sudah ditandatangani Indonesia. (Didik Suhariyanto, 2021).

Menguatnya globalisasi, maka saat ini Indonesia berada dalam pusaran arus perubahan yang sangat mendasar. Ini merupakan realitas baru yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka yang ditandai dengan kuatnya tarikan dari dua fundamentalisme yakni: fundamentalisme pasar pasar bebas dan fundamentalisme yang didasari keyakinan tertentu. Menghadapi dua tekanan fundamentalisme tersebut, negara cenderung lemah bahkan nyaris tak berdaya. (Roso Daris, 2013).

Kita harus kembali ke sejarah bahwasanya semua anak bangsa yang tergabung dalam berbagai macam suku turut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengambil peran masing-masing. Para tokoh bangsa yang bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah menyadari tantangan yang harus dihadapi oleh karena kemajemukan yang ada di dalam bangsa ini. Keberagaman menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dihindari di dalam negeri ini.

Pemikiran dan tindakan yang diperbuat tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menunjukkan pada dunia bahwa cita-cita bangsa akan terwujud dengan keanekaragaman itu. Ke-bhinneka-an adalah sebuah hakikat realitas yang sudah ada dalam bangsa Indonesia, sedangkan keTunggal-Ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan.

Semboyan inilah yang menjadi jembatan emas penghubung menuju pembentukan Negara berdaulat serta menunjukkan kebesarannya di mata dunia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan yang dijadikan dasar Negara Indonesia. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. (Soekarno, Sarinah, 1963.)

Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah, haruslah bersungguhsungguh dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat saling menghargai dengan masyarakat tanpa saling memikirkan percampuran suku bangsa, ras, agama, bahasa, dan keaneka ragaman lainnya. Tanpa adanya kesadaran di dalam diri rakyat Indonesia, maka pantaslah Indonesia akan hancur dan terpecah belah.

Pada era globalisasi saat ini tentu menciptakan dampak positif ataupun negatif, namun dibandingkan dengan dampak positifnya, penyerapan hal-hal negatif justru lebih banyak diserap oleh masyarakat apalagi anak remaja. Salah satu yang paling berpengaruh adalah dampak negatif bagi suatu negara akibat globalisasi ini, dampaknya adalah merosotnya nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia, seperti budaya luar yang bertentangan dengan isi Pancasila.

Hal tersebut dapat terjadi karena banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami Pancasila bahkan melupakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan, serta perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional ikut tertuang ke dalam perundang-undangan nasional.

METODE

Sebelum dilakukan program Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Kekuatan Pancasila Di Era Globalisasi Dunia Sebagai Arus Perubahan Sosial Di Kota Blitar di Aula Pemerintah Kota Blitar tanggal 19 – 21 Juni 2024 dalam rangka Memperingati bulan-bulan Bung Karno (Hari lahir dan Haul Bung Karno). Pengabdian ini sebelumnya dilakukan penelitian normative (Suharsimi Arikunto, 2010). terkait dengan perkembangan era globalisasi sebagai arus global yang terjadi perubahan sosial di kehidupan masyarakat di Indonesia, dimana Pancasila sebagai dasar filter dan penangkal arus global, dan Pancasila sebagai pendorong kemajuan arus globalisasi yang memiliki pengaruh untuk kebaikan bagi bangsa di seluruh dunia. (Lxy J. Meleong, 2002). Dan Penelitian ini sebagai bentuk pendalaman nilai bersama dalam bentuk etika dan rule of law.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Kekuatan Pancasila Di Era Globalisasi Dunia Sebagai Arus Perubahan Sosial Di Kota Blitar di Aula Pemerintah Kota Blitar tanggal 19 – 21 Juni 2024 dalam rangka Memperingati bulan-bulan Bung Karno (Hari lahir dan Haul Bung Karno). Diikuti mahasiswa dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno (BPP ABK) Universitas Bung Karno Jakarta dan di hadiri Walikota Blitar Bapak Santoso dan Sekda Kota Blitar Bapak Priyo Suhartono.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai Dasar Negara, Pancasila bersifat suprematif-otoritatif yakni menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara RI. Artinya, fungsi utama dan pertama dari Pancasila adalah sebagai "pengatur perilaku negara" (lembaga penyelenggara negara yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Pancasila mencerminkan sifat Pancasila menjadi ciri khas Indonesia dalam hidup bernegara. Pancasila sebagai dasar negara juga menegaskan keunggulan universal nilai-nilai Pancasila, sebab warga negara lain pun dalam keseharian dapat melaksanakan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila tanpa maksud menjalankan Pancasila. (Soekarno, 1961).

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) cita negara yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platform atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusi nasionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. (A. Hamid S. Attamimi, 1992).

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang terbentuknya kesepakatan-kesepakatan masyarakat untuk memusyawarahkan bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. (Rhen Soemhadiwidjojo, 2013).

Pancasila sebagai ideologi Negara berbeda dengan ideologi Liberalisme Kapitalis yang berpaham individualistik, juga berbeda dengan ideologi Sosialis Komunis yang berpaham kolektivitas komunal. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak warga masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. (Soekarno. 1946).

Ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi di bidang politik semata, seperti dalam ideologi Liberal Kapitalis, akan tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Adapun dalam sistem sosial komunis (*etatisme*), negaralah yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), ditemukan dalam Mukadimah Pembukaan UUD 1945, norma di bawahnya adalah *staatsgrundgesetz* yaitu batang tubuh UUD Negara yang juga biasa disebut sebagai *grondrecht*. (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* berarti mendudukkannya di atas UUD, sehingga Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada di atas konstitusi. (A. Hamid S. Attamimi, 1992)

Pancasila memiliki legitimasi politik yuridis untuk melawan segala dampak globalisasi yang menyeret bangsa dan negara ke arah yang menjauhi cita-cita keadilan sosial dan berbagai ragam bentuk baru dari kolonialisme dan imperialisme. Implikasi globalisasi Indonesia akan semakin terbuka bagi masuknya berbagai pemikiran, paham atau ideologi yang mungkin saja ada sebagian yang paralel dengan nilai-nilai Pancasila, atau menjadi "tandingan" bagi Pancasila.

Karena itu dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, maka menjadi kewajiban negara dan juga masyarakat adalah tetap menjaga dan mengembangkan Pancasila sebagai arus (*mainstream*) dalam baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam interaksi masyarakat. (Nazaruddin Sjamsuddin, 1993).

Dalam menghadapi globalisasi, Pancasila tidak hanya menjadi landasan yang kokoh bagi tegaknya negara bangsa, tapi juga menjadi sumber kekuatan bagi bangsa untuk menghadapi tekanan dari luar sekaligus untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya. (Franz Magnis Soeseno, 1997).

Bhineka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kitab 'Sutosoma', definisi Bhineka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keaneragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit.

Namun, sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhineka Tunggal Ika bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan menjadi fokus, tetapi pengertiannya lebih luas. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara memiliki cakupan lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya (adat-istiadat), beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju

persatuan dan kesatuan Negara. Seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan Negara Indonesia.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan di undang – undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara. Usaha pada masa Majapahit maupun pada masa pemerintahan Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan Negara. Sementara itu, semboyan “Tan Hana Darma Mangrwa” dipakai sebagai motto lambang Lembaga Pertahanan Nasional. Makna dari semboyan itu adalah tidak ada kebenaran yang bermuka dua

Adanya keragaman suku, budaya, agama ras di Indoneisia selama ini ada di Indonesia tidak pernah menampilkan perseteruan antar rakyat Indonesia. Keberagaman yang ada dipakai untuk membentuk suatu Negara yang besar. Keberagaman yang terjadi baik itu di dalam segi kepercayaan, warna kulit, suku bangsa, agama, bahasa, menjadikan Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dan berdaulat.

SIMPULAN

Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Kekuatan Pancasila Di Era Globalisasi Dunia Sebagai Arus Perubahan Sosial Di Kota Blitar di Aula Pemerintah Kota Blitar tanggal 19 – 21 Juni 2024 dalam rangka Memperingati bulan-bulan Bung Karno (Hari lahir dan Haul Bung Karno), diikuti mahasiswa dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno (BPP ABK) Universitas Bung Karno Jakarta dan tokoh masyarakat serta dihadiri oleh Walikota Blitar Bapak Santoso dan Sekda Bapak Priyo Suhartono. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kota Blitar sangat antusias bersemangat mendengarkan para pembicara.

Pancasila dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar yakni: a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa b. Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi manusia c. Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat d. Demokrasi yang didukung kecerdasan. e. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan f. Demokasi yang menerapkan konsep Negara Hukum Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. g. Demokasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa h. Demokasi yang berkeadilan sosial, Pelaksanaan demokasi diarahkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia i. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. j. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Sehingga di arus Globalisasi Pancasila dapat sebagai penguat benturan pengaruh interaksi sosial dunia, dan Pancasila tetap sebagai dasar penguat untuk kemajuan persaingan di dunia global.

SARAN

Diharapkan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Kekuatan Pancasila Di Era Globalisasi Dunia Sebagai Arus Perubahan Sosial Di Kota Blitar di Aula Pemerintah Kota Blitar tanggal 19 – 21 Juni 2024 dalam rangka Memperingati bulan-bulan Bung Karno (Hari lahir dan Haul Bung Karno), hidup bermasyarakat di Indonesia, untuk mencapai prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka harus saling menghormati antar satu pendapat dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari suatu titik temu dengan mementingkan suatu kepentingan bersama.

Beraneka ragam suku, agama, ras dan budaya di Indonesia, maka Indonesia adalah bangsa dengan tinglat prulalistik terbesar di dunia. Hal inilah yang membuat bangsa kita disegani oleh bangsa lain. Tapi, bila hal ini tidak bisa dipergunakan dengan baik, maka sangat mungkin akan terjadi disintegrasi di dalam bangsa. Agama, ras, suku bangsa, bahasa, adat dan budaya yang ada di Indonesia mempunyai jumlah yang tidak sedikit. Sikap saling toleran, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia, supaya terciptanya masyarakat yang tenteram dan damai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan program Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Kekuatan Pancasila Di Era Globalisasi Dunia Sebagai Arus Perubahan Sosial Di Kota Blitar di Aula Pemerintah Kota Blitar tanggal 19 – 21 Juni 2024 dalam rangka Memperingati bulan-bulan Bung Karno (Hari lahir dan Haul Bung Karno), kami ucapkan terima kasih kepada Walikota Blitar Bapak Santoso dan Sekretaris Daerah Kota Blitar Bapak Priyo Suhartono yang telah memberikan kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran kepada para mahasiswa dan para tokoh masyarakat. Dan semoga program pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat untuk bangsa dan negara. Kami berupaya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai kegiatan yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi. (1992). Teori Perundang-Undangan Di Indonesia. Jakarta: UI
- Didik Suhariyanto. (2021). Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Semarang: Jurnal USM Law Review. Vol 4 No. 1
- Franz Magnis Soeseno. (1997). Dalam Komnas HAM, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi & Konstitusionalisme. Jakarta: MK
- Lxy J. Meleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakary
- Nazaruddin Sjamsuddin. (1993). Soekarno; Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rhien Soemhadiwidjojo. (2013). Bung Karno Sang Singa Podium “Revolusimu Belum Selesai” Yogyakarta: Second Hope
- Roso Daris. (2013). Total Bung Karno; Serpihan Sejarah yang Tercecer, Depok: Imania.
- Suharsimi Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineke Cipta
- Soekarno. (1946). Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Soekarno, Sarinah. (1963). Kewajiban Wanita Dalam Perdjoengan Republik Indonesia, Jakarta: Panitia Penerbit Karangan Presiden Soekarno.
- Soekarno. (1961). “Lahirnya Pancasila” Dalam Tujuh Bahan Indoktrinasi, Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung.